

ISSN-E: 2623-2065
ISSN-P: 2684-8872

SINDANG

JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH

Vol 3 No. 2 (Juli-Desember 2021)

Pengaruh Model Pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Lubuklinggau

Erma Fitriyanti, Isbandiyah, Sarkowi

Analisis Konflik antara Indonesia dengan Timor Leste: Sengketa Perbatasan Darat

Berliana Fatihatuz Fiihza, Yulianti

Perkembangan Kurikulum Pendidikan Indonesia dari Masa ke Masa

Adeliya Putri Ananda, Hudaidah

Eksistensi Situs Leran di Gresik, Jawa Timur

Rahardi Teguh P., Rully Putri N.P., Wiwin Hartanto

Struktur Sosial dan Pemerintahan pada Masa Kesultanan Palembang Darussalam

Muhammad Reza Arviansyah, Hudaidah

Dampak Hubungan Kerjasama Tiongkok dalam Membangun Perekonomian di Pelabuhan Malaka Abad XV

Indira Rahma Syifa

Peran PNI dalam Membentuk Konsep Nasionalisme 1927-1936

Nukman

Peran APEC dalam Perekonomian Indonesia sebagai Negara Berkembang

Novita Diana Lestari

Sistem Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam pada Era Reformasi

Tiara Salwadila, Hudaidah

Konflik Indonesia Belanda terhadap Perebutan Kekuasaan Irian Barat

Aprilia Iva Swastika



Dewan Redaksi

SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah

Editor in Chief

Risa Marta Yati, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Section Editor

Ira Miyarni Sustianingsih, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Guest Editor

Dr. Syarifuddin, M.Pd. (Universitas Sriwijaya)

Ayu Septiani, M.Hum. (Universitas Padjadjaran)

Reviewer/Mitra Bestari

Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum. (Universitas Sebelas Maret)

Dr. Umasih, M.Hum. (Universitas Negeri Jakarta)

Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum. (Universitas Negeri Medan)

Kunto Sofianto, Ph.D. (Universitas Padjadjaran)

Asyhadi Mufsi Sadzali, M.A. (Universitas Jambi)

Administrasi

Viktor Pandra, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Dr. Doni Pestalozi, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Dewi Angraini, M.Si. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Alamat:

Jl. Mayor Toha Kel Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau 31626

Website: <http://ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/index>

Email: jurnalsindang@gmail.com

SINDANG: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH
Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember 2021)

	Halaman
Dewan Redaksi	i
Daftar Isi	ii
1. Pengaruh Model Pembelajaran <i>Contextual Teaching and Learning</i> terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Lubuklinggau <i>Erma Fitriyanti, Isbandiyah, Sarkowi</i>	91
2. Analisis Konflik antara Indonesia dengan Timor Leste: Sengketa Perbatasan Darat <i>Berliana Fatihatuz Fiizha, Yulianti</i>	95
3. Perkembangan Kurikulum Pendidikan Indonesia dari Masa ke Masa <i>Adeliya Putri Ananda, Hudaidah</i>	102
4. Eksistensi Situs Leran di Gresik, Jawa Timur <i>Rahardi Teguh P., Rully Putri N.P., Wiwin Hartanto</i>	109
5. Struktur Sosial dan Pemerintahan pada Masa Kesultanan Palembang Darussalam <i>Muhammad Reza Arviansyah, Hudaidah</i>	122
6. Dampak Hubungan Kerjasama Tiongkok dalam Membangun Perekonomian di Pelabuhan Malaka Abad XV <i>Indira Rahma Syifa</i>	132
7. Peran PNI dalam Membentuk Konsep Nasionalisme 1927-1936 <i>Nukman</i>	139
8. Peran APEC dalam Perekonomian Indonesia sebagai Negara Berkembang <i>Novita Diana Lestari</i>	152
9. Sistem Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam pada Era Reformasi <i>Tiara Salwadi, Hudaidah</i>	158
10. Konflik Indonesia Belanda terhadap Perebutan Kekuasaan Irian Barat <i>Aprilia Iva Swastika</i>	164

STRUKTUR SOSIAL DAN PEMERINTAHAN PADA MASA KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM

Muhammad Reza Arviansyah, Hudaidah
Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya
Alamat korespondensi: mrezaarvian@gmail.com

Diterima: 31 Maret 2021; Direvisi: 9 Juli 2021; Disetujui: 22 Juli 2021

Abstract

The Sultanate of Palembang Darussalam, an Islamic sultanate that stands in the city of Palembang, has a territory that is widely traversed by rivers that stretch and interconnected but still boils down to the Musi river as the center of government this is also what makes the majority of all people's life activities are on the banks of the river. People's lives here are also fairly orderly with the Simbur Cahaya Law that governs the entire order of life and is used by the Sultanate of Palembang as a guideline of the applicable law. Whether it applies to residents in the center of the capital (iliran) or to control the residents in the hinterland (uluan), in practice the Sultan has several princes and other officials to help run the government structure and appoint the person he trusts as the length of the sultan's hand so as to create order in the running of government and social conditions This data collection is done with various analysis of the existing written evidence while paying attention to the similarity between the content and the theme to be raised. This paper will try to raise about how the social situation of society and the condition of the government that took place in the Sultanate of Palembang Darussalam when viewed from an economic and legal point of view that became an advantage for the Sultanate of Palembang. So it is no wonder that later this Palembang sultanate area becomes an area that is considered strategic by outside nations.

Keywords: Social structure, government, Sultanate of Palembang Darussalam.

Abstrak

Kesultanan Palembang Darussalam, merupakan kesultanan Islam yang berdiri di kota Palembang, memiliki wilayah kekuasaan yang banyak dilalui oleh sungai yang membentang dan saling berhubungan namun tetap bermuara pada sungai Musi sebagai pusat dari pemerintahan hal ini juga yang membuat mayoritas seluruh aktivitas kehidupan masyarakat berada pada pinggir sungai. Kehidupan masyarakat disini juga terbilang tertib dengan adanya UU Simbur Cahaya yang mengatur seluruh tatanan kehidupan dan digunakan oleh Kesultanan Palembang sebagai pedoman hukum yang berlaku. Baik itu berlaku untuk penduduk pada pusat ibukota (iliran) maupun untuk mengontrol para penduduk yang berada pada daerah pedalaman (uluan), dalam praktiknya Sultan memiliki beberapa pangeran dan para pejabat lainnya untuk membantu menjalankan struktur pemerintahan serta menunjuk orang yang dipercayainya sebagai panjangan tangan dari Sultan sehingga dapat menciptakan ketertiban dalam berjalannya pemerintahan dan kondisi sosial masyarakat. Pengumpulan data ini dilakukan dengan berbagai analisis terhadap bukti-bukti tertulis yang ada dengan tetap memperhatikan kesesuaian antara isi dan tema yang akan diangkat. Penulisan ini akan mencoba mengangkat mengenai bagaimana keadaan sosial masyarakat dan kondisi pemerintah yang berlangsung pada Kesultanan Palembang Darussalam jika dilihat dari sudut pandang ekonomi dan hukum yang menjadi sebuah keunggulan bagi Kesultanan Palembang. Maka tak heran bahwa nantinya wilayah Kesultanan Palembang ini menjadi wilayah yang dinilai strategis oleh bangsa luar.

Kata Kunci: Struktur sosial, pemerintahan, Kesultanan Palembang Darussalam

A. Pendahuluan

Dilihat dari letaknya, Kesultanan Palembang Darussalam terletak pada sekitaran Sungai Batang Hari Sembilan yang meliputi 9 buah anak sungai yang berpusat pada Sungai Musi, sungai

Musi merupakan sungai utama dan yang terbesar di daerah Sumatera Selatan, khususnya pada kota Palembang. Selain itu wilayah Kesultanan Palembang Darussalam juga meliputi Pulau Bangka dan Pulau

Belitung yang mana kedua pulau ini juga merupakan penghasil komoditi terbesar bagi Kesultanan Palembang Darussalam pada masanya (Nawiyanto & Endrayadi, 2016)

Kesultanan Palembang dahulunya dapat dilihat sebagai pusat perdagangan, yang mana banyaknya kegiatan jika dilihat dari banyaknya aktivitas masyarakat pada waktu pagi hari hingga malam hari. Khususnya di pelabuhan yang terletak pada pusat Kota, banyak dijumpai kapal-kapal mulai dari kapal yang bersifat sederhana seperti rakit atau sampan, perahu-perahu dan kapal besar. Baik itu yang difungsikan sebagai angkutan masyarakat maupun yang difungsikan sebagai kegiatan perdagangan. Dari banyaknya aktivitas dan kegiatan yang terjadi di Palembang, maka sudah seharusnya memang penduduk disini bukan hanya orang asli pribumi saja melainkan juga banyak dari orang-orang luar, seperti misalnya yakni orang dari benua Asia, Eropa, bahkan orang dari benua Amerika (Sevenhoven, 1971)

Dalam perkembangannya pada pusat-pusat peradaban didunia telah banyak ditunjukkan bahwa awal mula munculnya itu juga dipengaruhi oleh Peran dari sebuah Sungai. Ambil saja contoh pada peradaban terkenal didunia, yaitu pada masa Mesir Kuno yang mana adanya peran dari sungai Nil dan lembah yang berada disekitar. Kemudian pada peradaban India Kuno yang didukung oleh adanya sungai Gangga dan sungai Tinggris. Dan sungai Tigris dan sungai Eufrat yang mempengaruhi dari perkembangan peradaban masyarakat di daerah Mesopotamia. Sama halnya dengan salah satu sungai yang ada di Indonesia, yakni sungai Musi yang mempengaruhi daripada perkembangan kerajaan budha sekaligus maritim Sriwijaya hingga pada masa perkembangan kerajaan islam Kesultanan Palembang Darussalam. Terlihat dari beberapa contoh diatas bahwa ada peran yang besar dari posisi letak geografis suatu wilayah yang mengakibatkan sebuah pembentukan dan sebagai aset paling

penting bagi pendirian sebuah peradaban manusia(I. Farida et al., 2019)

Salah satu daerah di Indonesia yang dapat dibilang memiliki sejarah dan budaya yang panjang adalah pada daerah Palembang, mulai dari awal munculnya kerajaan maritim pertama dan terbesar di Indonesia yakni Kerajaan Sriwijaya, kemudian hingga berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam. Banyak bukti yang berhasil ditemukan salah satunya merupakan Prasasti Kedukan Bukit yang merupakan prasasti tertua berisi tentang pendirian Kerajaan Sriwijaya dan dikatakan juga sebagai akte dari Kota Palembang. Namun belum dipastikan bahwa nama Palembang ini sendiri digunakan bersamaan dengan pendirian kerajaan Sriwijaya ataupun sesudah runtuhnya kekuasaan maritim dari Kerajaan Sriwijaya (Sustianingsih et al., 2019)

Dikota Palembang, mundur beberapa tahun terdapat kerajaan yang bercorak agama Budha pertama dan terbesar di Nusantara, kerajaan Sriwijaya yang menguasai hampir seluruh wilayah pulau sumatera ini berpusat di Palembang dan dapat menguasai kota-kota maupun pulau-pulau sekitar. Pengaruh pada bidang keagamaan Budha pun juga sangat terasa, menguasai jalur perdagangan di laut juga membuktikan seberapa penting dan vital nya sungai musu sebagai pembangun peradaban masyarakat daerah sumatera selatan sekarang ini tekhususnya kota Palembang dan sebagai sungai yang menghubungkan wilayah pusat pemerintahan kerajaan sriwijaya dan perairan luar (Cunino, 2018)

Kesultanan Palembang Darussalam memiliki wilayah Pemerintahan pada pinggiran sungai Musi, dibuktikan dengan megahnya berdiri Benteng Kuto Besak yang dapat dilihat hingga sekarang. Ini merupakan pusat dari pemerintahan Kesultanan, terletak di Kota Palembang yang mana kekuasaan Pemerintahan tertinggi diatur dan dipegang oleh Sultan seorang diri (M. Yahya Harun, 1996)

B. Metode Penelitian

Di dalam penulisan, akan dibahas adalah mengenai Sosial pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam. Yang dijadikan objek untuk penulisan ini adalah teks yang memuat atau terkandung serta terdapat gagasan tertentu didalamnya. Selain pada objek penelitian, Jenis data yang digunakan yaitu Data kualitatif. Data kualitatif inilah yang nantinya kemudian akan menjadi data deskriptif yang berisi data-data tertulis dan saling berkaitan diantara satu sama lain (Rasimin, 2018). Maka apabila dilihat dari jenis data dan tema penelitian yang akan dikaji, berdasarkan itu jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library reseach*). Penelitian ini pun menggunakan metode literatur yang mana dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber data tertulis yang didapat dari studi pustaka Jurnal, Skripsi, Buku dan juga sumber lainnya yang didapat dari internet serta relevan.

C. Pembahasan

Pembahasan Cerita sejarah dari Palembang yang cukup panjang ini juga merupakan faktor penting, terutama apabila dilihat memang potensi terbesar dari wilayah Palembang ini terletak pada sektor ekonomi dengan penduduk yang menyebar secara menyeluruh dan banyak terdiri dari beberapa suku atau marga yang berbeda. Terdapat banyak penduduk yang tinggal pada pusat ibukota, pinggiran kota, maupun pada pulau Bangka Belitung. Namun terdapat perbedaan antara penduduk yang tinggal di pusat ibukota yakni Palembang dengan penduduk yang tinggal pada daerah pedalaman, yang mana penduduk di pusat ibukota ini telah memiliki banyak percampuran sehingga terdiri dari berbagai rumpun etnis yang berbeda. Sedangkan pada penduduk di daerah pedalaman itu merupakan penduduk asli daerah Palembang (Nawiyanto & Endrayadi, 2016)

Pada awal mulanya hingga pada akhirnya masuk dan berkembangnya

agama islam di Palembang ini sama sekali tidak membawa pengaruh ataupun perubahan di berbagai bidang tentunya. Contoh kecilnya yakni dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat tradisional sekitar yang masih menggunakan cara sederhana dalam memimpin, tidak ada perbedaannya sama sekali atau tidak berubah seperti yang dapat kita lihat pada buku Sejarah Daerah Sumatera Selatan. Pada masa Kesultanan Palembang Darussalam Untuk tingkatan sosialnya pun dapat dilihat secara umum berdasarkan 3 tingkatan berbeda seperti Tingkatan Pemimpin yakni meliputi Sultan ataupun Raja, Tingkatan Terpandang yakni meliputi Para Kerabat ataupun Bangsawan, dan Tingkatan Bawah yakni meliputi para penduduk atau rakyat biasa (Sari et al., 2020)

Disini letak wilayah dari Kesultanan juga sangat mempengaruhi pada struktur sosial, maksudnya terbaginya dua daerah yang dipisahkan oleh sungai terkhususnya pada ibukota kesultanan yakni Palembang. Sungai Musi membelah dua wilayah pada kota Palembang menjadi daerah Ulu dan daerah Iliran. Kemudian didalam Kesultanan Palembang ini sendiri juga banyak mengalami perubahan, baik itu pada perubahan didalam dan diluar kesultanan. Contohnya yaitu perubahan bentuk yang terjadi pada tatanan sosial atau yang lebih dikenal dengan struktur sosial. Ini juga searah dan sejalan daripada masa awal berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam pertama kali, masa mulai berkembangnya Kesultanan Palembang Darussalam, dan masa berakhirnya atau runtuhnya Kesultanan Palembang Darussalam (Sari et al., 2020)

Mengacu pada apa yang akan dibahas, yakni mengenai Struktur sosial masyarakat pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, secara spesifik dapat dibagi menjadi 4 buah golongan yang mana terdiri dari Pemimpin (Sultan atau Raja), Elit pemerintahan (Bangsawan) dibagi dua yakni terdiri dari Elit yang memerintah dan Elit yang tidak memerintah (Ravico, 1821),

Masyarakat (Irian dan Uluu) serta Para Budak. Pembagian inipun juga bersifat semua yang mana berarti tanpa terkecuali dan terkhususnya bagi masyarakat asli pribumi atau Indonesia baik itu masyarakat yang tinggal pada pusat ibukota kesultanan dan masyarakat yang tinggal pada daerah pedalaman daerah. Piramida sosial diduduki Sultan sebagai penempatan tertinggi dalam struktur sosial masyarakat. Posisi ini dikaitkan pada kedudukan atau wewenang dari Sultan itu sendiri yang memiliki pengaruh dan dianggap setara dengan tingkatan nabi sebagai penerus atau panjangan tangan dari Allah. Dengan ini bahwa dapat diyakini Sultan merupakan sosok yang memiliki banyak kelebihan dan kepandaian (Nawiyanto & Endrayadi, 2016).

Selanjutnya ada golongan budak, disini para budak lebih dimaksudkan kepada orang-orang yang telah kehilangan kemerdekaan atau orang yang menjadikan dirinya sebagai tawanan orang lain. Yakni mereka memiliki keterikatan tertentu dengan orang lain. (Sevenhoven, 1971) melukiskan bahwa Golongan budak juga kerap dikatakan sebagai golongan yang rendah dan yang paling sengsara hidupnya. Budak ini juga merupakan layaknya barang dagangan, bahkan sempat dijadikan sebagai perdagangan lainnya (Nawiyanto & Endrayadi, 2016).

Pada hakikat kehidupannya, para pemuka pimpinan marga dan bangsawan yang memiliki kekuasaan atas dusun/desa diberikan sebuah kewajiban yang bersifat mengikat dan juga kewajiban ini harus dilaksanakan. Yang mana kewajibannya itu adalah untuk membantu apabila Sultan Palembang memiliki kendala dalam perang, bantuan itu dapat berbentuk tenaga maupun barang dan harta sesuai kebutuhan. Disini bukan hanya berlaku pada penduduk asli Palembang, namun merujuk juga kepada orang luar (non pribumi) yang tinggal dan menetap di daerah kekuasaan Sultan. Seperti orang-orang Tionghoa/Cina yang menetap di

pinggir sungai dan orang-orang Arab yang telah memiliki Kampung tersendiri (Mikail, 2018).

Bahkan, disini juga dikatakan bahwa kekuasaan sultan juga bersifat absolut dan mutlak (Van sevenhoven, 2011), serta karena gelar dan posisi sultan yang sangat istimewa ini juga menimbulkan konflik yang terjadi diantara anggota keluarga inti kesultanan (Syawaludin, 2016). Karena juga dalam pemerintahannya Kesultanan Palembang Darussalam memiliki peraturan yang terkenal yakni UUSC atau yang biasa dikenal dengan Undang-Undang Simbur Cahaya ciptakaan Ratu Sinuhun. Tapi, dalam praktiknya kekuasaan atau kekuatan Sultan ini dapat menjadi sebuah hukum yang mana tidak akan ada yang berani dan memiliki kekuasaan untuk tidak menuruti ataupun membantahnya. Hal inilah yang mana dalam praktiknya banyak dilihat dan dinilai oleh orang luar pribumi atau non pribumi bahwa adanya kekuasaan yang bersifat absolutisme pada masa pemerintahan kesultanan Palembang Darussalam (Nawiyanto & Endrayadi, 2016)

Kesultanan Palembang, dalam menjalankan sistem pemerintahan maupun sistem keamanannya diatur sedemikian mungkin, ini dimaksudkan karena telah adanya peraturan yang mengatur mengenai semua hal, puncak dari adanya peraturan ini adalah berlakunya Undang-Undang Simbur Cahaya. Selain berdasarkan Undang Undang dalam pengambilan suatu keputusan tetap digunakannya Al-Quran sebagai pedoman tertinggi, ini sesuai dengan konsep Kesultanan yang mana agama islam merupakan agama wajib dan berlaku di sini (Subroto, 2017).

Disini juga terlihat bahwa aturan-aturan yang ada di kesultanan Palembang memiliki banyak peran dalam membentuk sifat, karakter, maupun watak dari para penduduk yang ada dikota Palembang. Dengan telah diberlakukannya aturan secara jelas dan terstruktur, ini menjadikan suatu hal yang dapat mengatur

berjalannya aspek kehidupan sosial. Maka banyak hal positif yang dapat diambil dan diteladani, dan apabila dilihat peran dari peran masyarakat juga mendapatkan respon yang baik karena aturan disini juga mengatur tentang seluruh hak-hak dan kewajiban dari masyarakat (Wirajaya, 2018).

Undang-Undang simbur cahaya ini juga dijadikan peraturan yang dipakai, seperti yang diketahui dari mulai masa kesultanan, masa pemerintah kolonial, dan pada era kemerdekaan awal. secara tak langsung ini juga berarti bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh kesultanan Palembang Darussalam dapat dirasakan dampaknya, tidak hanya pada masa kesultanan namun hingga pada masa seterusnya juga masih dipakai. Namun bukan berarti isi daripada UU ini tidak mengalami perubahan, tentunya pada setiap masa ataupun era terdapat banyak perubahan yang terjadi didalamnya. Mulai dari perubahan kondisi wilayah, perubahan sifat penduduk, dan perubahan kebijakan kepemimpinan sesuai dengan siapa pemegang kekuasaan tertinggi (Farida & Hasan, n.d.).

Perlu diingat lagi juga bahwa dalam praktik kehidupan sosial masyarakat, masyarakat kesultanan Palembang Darussalam ini memiliki Simbur Cahaya, dalam isinya dituliskan semuanya mengenai hal-hal yang mencakup kegiatan individual masyarakat. Baik itu kegiatan yang bersifat perilaku diri sendiri maupun perilaku diri kita dalam hidup bermasyarakat, dipergunakan sebagai pedoman hidup dari masyarakat untuk dipatuhi dan ditaati. Dimaksudkan bahwa nantinya tidak ada kekacauan yang terjadi di kehidupan sosial masyarakat, baik oleh masyarakat daerah pusat kota (Iliran) maupun masyarakat daerah (Uluan) (Adil, 2015).

Dalam kegiatan sosial masyarakat di bidang perdagangan, Kesultanan Palembang lebih memfokuskan penduduk Palembang untuk melakukan pemasaran hasil bumi kepada daerah-daerah lain yang berada diluar ruang lingkup kekuasaan Sultan. Seperti ke

pedagang dari daerah Asia, Timur tengah, Cina, maupun pada pulau Jawa dan pulau timur Indonesia. Transaksi perdagangan dilakukan diatas kapal ataupun rakit penduduk, berbagai hasil bumi dijual oleh penduduk dengan sistem pembayaran menggunakan uang koin maupun dengan menggunakan sistem barter dengan barang (Mikail, 2018).

Palembang memiliki keadaan kenampakan wilayah yang jika dilihat lebih dominan dataran rendah dibandingkan dataran tinggi, serta penambahan pulau Bangka Belitung yang masih termasuk ke dalam wilayahnya. Tidak ada akses langsung laut ke dalam pusat kota Palembang, namun sebagai penggantinya Palembang ini memiliki banyak sungai yang saling menghubungkan antar daerah. Menjadikan perikanan sektor yang cukup banyak dijadikan sebagai mata pencaharian masyarakat daerah pedalaman (uluhan). Ini dapat dibuktikan dengan masyarakat yang tinggal pada muara sungai Musi (sungang) yang banyak masyarakatnya menjadi nelayan dengan menangkap ikan dan dipasarkan ke sesama pedagang dari daerah luar wilayah kesultanan seperti ke Pulau Jawa dan pulau lain (F. Farida, 2009).

Maka perdagangan pada Kesultanan Palembang juga dapat dibilang sangat menguntungkan pada masanya, yang mana mendapat bantuan penjualan dari Timah yang ada di Pulau Bangka. Hal ini juga menjadikan penduduk Palembang banyak yang bekerja disana, serta menjadikan banyaknya saudagar-saudagar kaya datangan dari Arab yang melakukan perdagangan hingga ke Palembang. Tak hanya sebatas untuk berdagang, mereka orang-orang Arab juga menikahi orang Palembang, ini membawa pengaruh dan perubahan yang terjadi didalam wilayah Kesultanan. Selain menikah orang-orang Arab juga dapat menyebarkan agama Islam di wilayah Kesultanan Palembang, dan nantinya akan ada didirikan serta dapat dijumpai perkampungan Arab di

wilayah Kesultanan Palembang hingga sekarang (Rochmiatun, 2017).

Kemudian pada kegiatan ekonomi, ada satu hal yang dijadikan sebuah perintah wajib dari sultan. Ini merupakan keharusan karena merupakan hal yang banyak diinginkan oleh para bangsawan maupun pejabat di dalam kesultanan, yakni mengenai penanaman lada. Para petani ditugaskan untuk menanam lada, hasil yang mereka dapatkan dari penjualan lada akan dijadikan sebagai pajak tanah yang harus mereka bayar. Dapat diketahui bahwa di wilayah Palembang ini berlaku pemahaman bahwa setiap tanah merupakan milik Sultan sepenuhnya, sedangkan bagi para penduduk hanyalah dianggap sebagai pemanfaat tanah dan penunggu dari tanah milik sultan ini. Sebagai gantinya seperti yang telah dijelaskan bahwa para penduduk harus membayar pajak kepada sultan (Nawiyanto & Endrayadi, 2016).

Namun para penduduk juga diberi keringanan berupa pertukaran dari hasil bumi berupa lada kepada Sultan, untuk digantikan dengan hasil impor (luar) perdagangan seperti pakaian, pangan, dan candu yang sebagian besar untuk perdagangan dari luar itu dimonopoli oleh sultan langsung. Dan dalam pendekatannya sungai juga berperan penting karena banyak penduduk yang bergantung pada pengambilan ikan dan semacamnya. Karena jika dilihat memang wilayah Kesultanan Palembang dulunya didominasi oleh persebaran perairan berupa sungai dan beberapa anak sungai serta tanah-tanah rawa yang dapat memberikan suatu keuntungan bagi para penduduk Kesultanan Palembang Darussalam (Nawiyanto & Endrayadi, 2016).

Kekuasaan pemerintahan pada kesultanan Palembang, seperti yang telah disinggung diawal pembahasan tadi masih bersifat sederhana. Yang mana masih sangat tradisional dengan dipimpin oleh Sultan yang memiliki daya tarik tinggi sehingga disegani oleh masyarakat, sedangkan para pembantu dan struktur pemerintahan dari sultan

ini berbentuk feodalisme yakni sultan memiliki peran sebagai kepala keagamaan dan kepala politik atau dapat dikatakan sebagai pemimpin penuh yang memiliki wewenang terhadap wilayah kesultanan, kaum bangsawan sebagai pembantu dari kekuasaan sultan, dan para penduduk yang berperan sebagai rakyat biasa sekaligus sebagai abdi kesultanan (Syawaludin & Sirajudin Fikri, 2019).

Penguasa pertama dan tertinggi di dalam pemerintahan adalah Sultan. Sultan memiliki kekuasaan yang tidak ada batasan dan aturan yang berlaku. Dibawah Sultan ada Pangeran Ratu (Pangeran Mahkota), yang mana bertugas untuk membantu Sultan dan memiliki wewenang khusus seperti menggantikan posisi Sultan apabila Sultan berhalangan hadir, sebagai penasihat yang selalu ada ketika dibutuhkan oleh Sultan, dan sebagai penerus dari tonggak kepemimpinan Sultan. Selain itu ada Pangeran Adipati yang disini berperan sebagai pembantu Pangeran Mahkota sekaligus berada pada perintah langsung Sultan. Pangeran Adipati bertugas untuk mempersiapkan dan membimbing atau lebih mudah dikenal dengan mengajari Pangeran Mahkota sebagai persiapan sebelum ia diangkat menjadi Sultan (R Wargadalem, 2017).

Sebagai pejabat penting di ruang lingkup Kesultanan, Pangeran Mahkota dan Pangeran Adipati juga berhak apabila ingin menggantikan atau mewakili Sultan dalam suatu acara pertemuan ataupun jamuan lainnya. Selain itu, Kesultanan Palembang juga memiliki beberapa para bangsawan ataupun pejabat lain sesuai dengan bidangnya seperti pada bidang Politik, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Keagamaan, dan Ekonomi perdagangan. (R Wargadalem, 2017).

Pada bidang Politik pertahanan dan keamanan, dibantu oleh Perdana menteri Kesultanan. Yang memiliki tugas untuk mengurus masalah pada wilayah pemerintahan dan Keamanan Kesultanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Perdana Menteri dibantu oleh

seorang bawahan yakni Tumenggungkerto. Yang langsung membawahi 4 orang bawahan lagi yang memiliki tugas berbeda-beda dan bertanggung jawab pada bidang yang mereka bawahi yakni pada bidang Administrasi, Istana, Keamanan dan pertahanan Masyarakat, dan Pengintai istana kesultanan (mata-mata) langsung Kesultanan. (R Wargadalem, 2017)

Pada bidang peradilan, dibantu oleh Pangeran Kehakiman. Yang memiliki tugas untuk mengurus masalah pada wilayah peradilan dan hukum Kesultanan. Peradilan hukum tertinggi yang berlaku pada Kesultanan didasarkan pada piagam hukum adat yang telah berlaku secara turun-temurun dan ditetapkan oleh Sultam. Dalam melaksanakan tugasnya, Pangeran Kehakiman dibantu oleh beberapa bangsawan atau pejabat Istana yang mendapatkan gelar tanda. Para Tanda menyebar ke berbagai wilayah kekuasaan Kesultanan ini dan sebagai orang yang memiliki kewenangan dalam menangani para pelanggar hukum atau aturan yang berlaku. Jika terdapat masalah besar dan berat yang tidak dapat diputuskan oleh mereka maka akan diserahkan kepada Sultan dan para petinggi hukum Kesultanan. (R Wargadalem, 2017).

Pada bidang keagamaan, dibantu oleh Pangeran Penghulu. Yang memiliki tugas untuk melakukan kegiatan keagamaan di masjid-masjid terutama pada Masjid Agung, sebagai Penasehat spiritual Sultan, dan sebagai pengawas dari para Penghulu yang terdapat pada wilayah kekuasaan Kesultanan. Pangeran Penghulu ini biasanya terdiri dari keluarga dekat Sultan sendiri. Pangeran Penghulu dibantu oleh beberapa bawahan yang menyebar juga ke daerah wilayah Kesultanan, seperti para Penghulu, Penghulu besar atau kecil, khatib, dan pemuka adat. Tugas mereka yaitu mengurus mengenai masalah yang berkaitan dengan kondisi spiritual kesultanan seperti perkelahian, perebutan kekuasaan, perwarisan, pernikahan, dan acara keagamaan. (R Wargadalem, 2017)

Pada bidang perdagangan, dibantu oleh Syahbandar yang bertanggung jawab penuh terhadap masalah pelabuhan yang menjadi pusat sentral dari perdagangan. Bertugas untuk mencegah perselisihan yang terjadi sesama para pedagang dalam melakukan transaksi dan mencegah perkelahian yang kerap timbul didalam Kapal. Dalam melaksanakan tugasnya syahbandar ini dibantu oleh 4 orang bawahan, yang memiliki tugas berbeda. Seperti pengawas perdagangan, pengawas pajak pelabuhan, dan pengawas ketertiban dan keamanan pelabuhan. Selain berada di pelabuhan, para syahbandar ini juga memiliki terdapat pada wilayah istana kesultanan yang membantu jalannya perdagangan pemerintahan (R Wargadalem, 2017).

Terdapat juga beberapa wakil dari pihak pusat kesultanan yang berada di daerah pedalaman (uluan), yakni jeneng dan raban. mereka disini bertugas untuk mengumpulkan pajak dari penduduk, menjalankan pemerintahan sesuai kehendak Sultan. Jeneng memiliki kedudukan di daerah pedalaman (uluan), biasanya terdiri dari para penduduk biasa sedangkan untuk raban memiliki kedudukan di daerah sekitar pusat pemerintahan kesultanan, biasanya terdiri dari para bangsawan atau pejabat pemerintahan. Namun mereka tidak memiliki kuasa penuh atas peradilan atau hukum (R Wargadalem, 2017).

Sedangkan untuk pemerintahan murni yang terdapat di daerah pedalaman (uluan) dilakukan oleh para kepala marga yang bergelar depati. Mereka bersifat sendiri-sendiri dan dalam artian tidak terlalu mesti mengikuti Pemerintahan pusat yang berarti bebas untuk mengatur pemerintahannya sendiri, namun tetap apabila sultan meminta bantuan dalam bentuk apapun itu, mereka harus tetap tunduk dan patuh. Mereka memiliki beberapa wewenang yakni diantaranya adalah sebagai penjalan pemerintahan, kepala peradilan, dan sebagai penjaga tradisi berdasarkan marga masing-masing. Kemudian bagi para depati

yang telah memiliki masa jabatan atau pemerintahan cukup lama akan diberikan gelar pangeran. Hal ini bertujuan agar nantinya mereka dapat ikut dalam pertempuran apabila dibutuhkan (R Wargadalem, 2017).

Sedangkan, untuk wilayah Pulau Bangka-Belitung yang juga masih merupakan daerah kekuasaan dari Kesultanan Palembang Darussalam. Sultan mengangkat seorang sebagai wakil dari dirinya yang berada di daerah itu, umumnya yang dipilih Sultan adalah para bangsawan ataupun pejabat dari kota Palembang. Mereka memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas atas kuasa dari Kesultanan Palembang Darussalam. Dan untuk wilayah yang terdapat pada daerah pedalaman, dipilih juga seorang yang langsung ditunjuk oleh Sultan yakni jeneng dan raban. mereka disini bertugas untuk mengumpulkan pajak dari penduduk, menjalankan pemerintahan sesuai kehendak Sultan. Jeneng memiliki kedudukan di daerah pedalaman (uluan), biasanya terdiri dari para penduduk biasa sedangkan untuk raban merupakan bangsawan yang memiliki kedudukan di daerah sekitar pusat pemerintahan (R Wargadalem, 2017).

D.Kesimpulan

Kesultanan Palembang Darussalam jika dilihat dari bidang sosial memiliki kesamaan layaknya pada kerajaan lain yang ada di nusantara. Yakni apabila dilihat dari tingkatan secara umum itu terdiri dari 3 tingkatan yang berbeda yakni tingkatan pemimpin yang meliputi Sultan ataupun Raja, tingkatan terpendang yang meliputi para kerabat ataupun bangsawan, dan tingkatan bawah yang meliputi para penduduk atau rakyat biasa. Kesultanan Palembang juga dalam melaksanakan kegiatannya itu sangat terbantu oleh hadirnya sungai yang membelah wilayah Palembang menjadi dua yakni daerah pusat ibukota (iliran) dan daerah pedalaman (uluan). Sungai ini sangat mempengaruhi pada kondisi Kesultanan, baik itu sosial masyarakat,

sistem politik, maupun kegiatan ekonomi. Contohnya yaitu perubahan bentuk yang terjadi pada tatanan sosial atau yang lebih dikenal dengan struktur sosial. Ini juga searah dan sejalan daripada masa awal berdirinya Kesultanan Palembang pertama kali, masa mulai berkembangnya Kesultanan Palembang Darussalam, dan masa berakhirnya atau runtuhnya Kesultanan Palembang Darussalam.

Pada kondisi sosial, secara spesifik dapat dibagi menjadi 4 buah golongan yang mana terdiri dari pemimpin (Sultan atau Raja), elit pemerintahan (Bangsawan) dibagi dua yakni terdiri dari elit yang memerintah dan elit yang tidak memerintah, Masyarakat (Iliran dan Uluan) serta Para Budak. Pembagian inipun juga bersifat semua yang mana berarti tanpa terkecuali dan terkhususnya bagi masyarakat asli pribumi atau Indonesia baik itu masyarakat yang tinggal pada pusat ibukota kesultanan (iliran) dan masyarakat yang tinggal pada daerah pedalaman daerah (uluan). Dalam kegiatan sosial masyarakat di bidang perdagangan, Kesultanan Palembang lebih memfokuskan penduduk Palembang untuk melakukan pemasaran hasil bumi kepada daerah-daerah lain yang berada diluar ruang lingkup kekuasaan Sultan. Seperti ke pedagang dari daerah Asia, Timur tengah, Cina, maupun pada pulau Jawa dan pulau timur Indonesia.

Kesultanan Palembang, dalam menjalankan sistem pemerintahan maupun sistem keamanannya diatur sedemikian mungkin, ini dimaksudkan karena telah adanya peraturan yang mengatur mengenai semua hal, puncak dari adanya peraturan ini adalah berlakunya Undang-Undang Simbur Cahaya. Selain berdasarkan Undang Undang dalam pengambilan suatu keputusan tetap digunakannya Al-Quran sebagai pedoman tertinggi. Penguasa pertama dan tertinggi di dalam pemerintahan adalah Sultan. Dibawah Sultan ada Pangeran Ratu (Pangeran Mahkota), yang mana bertugas untuk membantu Sultan dan

memiliki wewenang khusus seperti menggantikan posisi Sultan apabila Sultan berhalangan hadir, sebagai penasihat yang selalu ada ketika dibutuhkan oleh Sultan, dan sebagai penerus dari tonggak kepemimpinan Sultan. Selain itu ada Pangeran Adipati yang disini berperan sebagai pembantu Pangeran Mahkota sekaligus berada pada perintah langsung Sultan. Pangeran Adipati bertugas untuk mempersiapkan dan membimbing atau lebih mudah dikenal dengan mengajari Pangeran Mahkota sebagai persiapan sebelum ia diangkat menjadi Sultan. Selain itu, Kesultanan Palembang juga memiliki beberapa para bangsawan ataupun pejabat lain sesuai dengan bidangnya seperti pada bidang Politik, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Keagamaan, dan Ekonomi perdagangan.

Daftar Referensi

- Adil, M. (2015). Dinamika Pembauran Hukum Islam Di Palembang: Mengurai Isi Undang-Undang Simbur Cahaya. *Nurani*, 14(2), 57–76. <https://doi.org/10.19109/nurani.v14i2.110>
- Cunino, M. A. (2018). Nasionalisme, Toleransi, Dan Kepemimpinan Pada Buku Teks Pembelajaran Sejarah Sma. *Historia*, II(1), 51–60.
- Farida, F. (2009). Perekonomian Kesultanan Palembang. *Jurnal Sejarah Lontar*, 6(1), 12. <https://doi.org/10.21009/lontar.061.02>
- Farida, & Hasan, Y. (n.d.). *Undang-Undang simbur cahaya sebagai sumber hukum di kesultanan palembang*. https://repository.unsri.ac.id/25296/1/Undang_Undang_Simbur_Cahaya.pdf
- Farida, I., Rochmiatun, E., & Kalsum, N. U. (2019). Peran Sungai Musi dalam Perkembangan Peradaban Islam di Palembang: Dari Masa Kesultanan sampai Hindia-Belanda. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3(1), 50. <https://doi.org/10.30829/juspi.v3i1.4079>
- M. Yahya Harun. (1996). *Kerajaan Islam Nusantara Abad xvi & xvii*.
- Mikail, K. (2018). Ijtihad Politik Islam Palembang Di Masa Orde Baru. *JPP (Jurnal Politik Profetik)*, 6(1), 30–53. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/5807>
- Nawiyanto, & Endrayadi, E. (2016). *Kesultanan Palembang Darussalam sejarah dan warisan budayanya*. [https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/75333/Nawiyanto%2CEko CE_Buku_Kesultanan Palembang_%28F. Ilmu Budaya%29.pdf?sequence=1](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/75333/Nawiyanto%2CEko%20CE_Buku_KesultananPalembang_%28F. Ilmu Budaya%29.pdf?sequence=1)
- R Wargadalem, F. (2017). *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik (1824-1825)*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Rasimin. (2018). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Kualitatif* (pp. 1–37). [http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/4494/1/METODOLOGI PENELITIAN Pendekatan Praktis Kualitatif.pdf](http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/4494/1/METODOLOGI%20PENELITIAN%20Pendekatan%20Praktis%20Kualitatif.pdf)
- Ravico. (1821). *Racico Konflik Elit Politik di Kesultanan Palembang ...* | 39. *XIV(2)*, 39–66.
- Rochmiatun, E. (2017). BUKTI-BUKTI PROSES ISLAMISASI DI KESULTANAN PALEMBANG. *Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 17.
- Sari, L. F., Syawaludin, M., & Khudin, S. (2020). *Dinamika Kelas Sosial Masyarakat Di Kesultanan Palembang Darussalam Pada Masa Transisi Pendahuluan*. I(1), 1–15.
- Sevenhoven, J. . Van. (1971). *Lukisan tentang ibukota Palembang*. penerbit bhatar.
- Subroto, K. (2017). NEGARA ISLAM DI SUMATRA Negara Islam di Sumatra 840-1903 M. *Syamina*, 16, 37.
- Sustianingsih, I. M., Yati, R. M., & Iskandar, Y. (2019). Peran Sultan Mahmud Badaruddin I Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kota Palembang (1724-1758). *TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 19(1), 49–62. <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v19i1.3399>
- Syawaludin, M. (2016). Analisis Sosiologis terhadap Sistem Pergantian Sultan di Kesultanan Palembang Darussalam. *Intizar*, 20(1), 139–162. <https://doi.org/10.19109/intizar.v20i1.427>
- Syawaludin, M., & Sirajudin Fikri, M. (2019). *Tradisi Politik Melayu : Analisis Pengangkatan dan Pergantian Kekuasaan di Kesultanan Palembang* (Vol. 53, Issue 9). Rafah Press.
- Van sevenhoven, J. . (2011). *Lukisan tentang ibukota palembang*. Penerbit Ombak.
- Wirajaya, A. Y. (2018). *Transformasi Palembang Menuju Kota Multikultural : Sebuah Refleksi terhadap Naskah*

*Undang-Undang Simbur Cahaya dan
Tuhfah ar-Raghibin. 3.*
<https://doi.org/10.22515/shahih.v3i1.1291>